



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan 74112,
Telepon (0532) 21010, Faksimile (0532) 21001, Laman kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 18 Desember 2023

Nomor : 800/3282/BKPSDM.III/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian LHKPN Periodik Tahun 2023

Yth Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara:

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor:800/404/BKPSDM.III/2023 Tentang Penetapan Nama Pejabat Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Penyelenggara Negara yang telah ditetapkan sebagai Wajib Lapor oleh Pimpinan Daerah wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Untuk itu diminta kepada seluruh Wajib Lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk segera mengisi dan menyampaikan LHKPN Tahun 2023 melalui modul *e-filing* pada aplikasi e-LHKPN di <https://eihkpn.kpk.go.id> Penyampaian LHKPN paling lambat tanggal **31 Januari 2024** dan menyampaikan berkas perbaikan Penyampaian LHKPN paling lambat **31 Maret 2024**.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Admin Unit Kerja LHKPN yang berada di masing-masing Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja atau Sdr. Dia Ul Laila (Hp.0821-5783-7252) dan Sdr. Ridwan (Hp.0822-5522-2773).

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGINBARAT

JUNI GULTOM

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 800/404/BKPSDM.III/2023**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Direktur BUMD, Camat, Auditor, P2UPD, Pejabat Pengadaan, Bendahara, Verifikator Keuangan, Kepala Unit Pelayanan Masyarakat serta KPA dan PPTK yang diserahi tugas mengelola Anggaran Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ke atas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Nama Pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA : Daftar Nama Pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2023 di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Setiap Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- KEEMPAT : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN baik cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 15 Desember 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Tembusan Kepada Yth.

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Inspektur Kab. Kotawaringin Barat

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023
(AKUMULASI)

No.	UNIT ORGANISASI	NAMA	NIP	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1	2	3	4	5	6
1	SEKRETARIAT DAERAH	Drs. TENGKU ALI SYAHBANA, M.Si	196807301989111001	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PANGKALAN BUN , 30 Juli 1968
2	SEKRETARIAT DAERAH	Drs. SYAHRUDDIN, M.Si	196703031997101001	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KANDANG HALANG, 3 Maret 1967
3	SEKRETARIAT DAERAH	SUYANTO, SH	196404181992031009	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	PONOROGO, 18 April 1964
4	SEKRETARIAT DAERAH	ALFAHUSAIN, SST. MT	196907271996031004	KEPALA BAGIAN	BANJARMASIN, 27 Juli 1969
5	SEKRETARIAT DAERAH	KALSON PAHOTAN SIANIPAR, S.STP, M.A.P	198611092004121002	KEPALA BAGIAN	BAJAR BARU, 9 November 1986
6	SEKRETARIAT DAERAH	MUHAMMAD RUBIANSYAH, S.Pt. Mgi	197812052003121002	KEPALA BAGIAN	PANGKALAN BUN, 5 Desember 1978
7	SEKRETARIAT DAERAH	TENGKU JAYADI, SH	196606301989031013	KEPALA BAGIAN	KOTAWARINGIN BARAT, 30 Juni 1966
8	SEKRETARIAT DAERAH	RACHMAD ZULFIKAR, A.Md	197202022003121007	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPENGAWAIAN	PALANGKARAYA , 2 Februari 1972
9	SEKRETARIAT DAERAH	SUCARWANTO, SE	197304042006041018	ANALIS KEBIAKAN	GUNUNG KIDUL, 4 April 1973
10	SEKRETARIAT DAERAH	IKA PRIHYA SANITI, S.AP	198704182006042004	BENDAHARA	PERSIAPAN BUMI HARJO, 18 April 1987
11	SEKRETARIAT DAERAH	GUSNADI, SH	197702161997031004	BENDAHARA	PALANGKA RAYA, 1 October 1976

No.	UNIT ORGANISASI	NAMA	NIP	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1	2	3	4	5	6
249	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLUNDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DEASY KUSUMA RETNANINGTYAS, A.Md	197512012010012006	BENDAHARA	SURAKARTA, 1 Desember 1975
250	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLUNDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SITI MUJADILAH, A.Md.Keb.	197802052005012010	PELIABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	PALANGKARAYA, 5 Februari 1978
251	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Ir. KAMALUDDIN, M.Si	196501051994031010	KEPALA DINAS	KOTAWARINGIN BARAT, 5 Januari 1965
252	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Ir. HEPHY SEPTIANA	196709201993032010	SEKRETARIS	PANGKALAN BUN, 20 September 1967
253	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SRI RAHAYU FITRIYATI, A.Md	197711202010012007	BENDAHARA	KENDAL, 20 November 1977
254	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ALTHAFI MURNI, A.Md.AL	199808112022032014	VERIFIKATOR KEUANGAN	KAPUAS, 11 Agustus 1998
255	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	JAMRI, S. Pd	197407141997031003	SEKRETARIS	KUBU, 14 Juli 1974
256	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARLIYAH, S.Mn	197007302005012012	KEPALA BIDANG	PANGKALANBUN, 30 Juli 1970
257	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MUHAMMAD ALAMSYAH, S.Pd	197004111998021002	KEPALA BIDANG	PANGKALAN BUN, 11 April 1970
258	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	NURHASANAH, S.Pd	196604181990032011	KEPALA BIDANG	PANGKALAN BUN, 18 April 1966
259	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RAHMAD TRISDIANTO, S.Pd	196711281990011001	KEPALA BIDANG	SURABAYA, 28 November 1967
260	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	VERONICA ERNITA VANUARIYANTI, S.Kom	197601142010012001	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN SD	SLEMAN, 14 Januari 1976
261	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RUMANI, S.Pd,SD	196605071986081001	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	KOTAWARINGIN BARAT, 7 Mei 1966

No.	UNIT ORGANISASI	NAMA	NIP	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1	2	3	4	5	6
262	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	HERLINA DWI PUSPITAWATI, SE	198107172010012007	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PAUD	PONOROGO, 17 Juli 1981
263	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MUNAWI, S. Pd	198205082006041009	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL	SEMARANG, 8 Mei 1982
264	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANITA, SE	198105152005012016	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SD	KLAKAH, 15 Mei 1981
265	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	NGARIYAH, SAP	197606121998032003	KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER SMP	PUJWOREJO, 12 Juni 1976
266	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DIEN FAHRIYANDY, ST, MPsc, M.Eng	197812272005011011	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SD	PANGKALAN BUN, 27 Desember 1978
267	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MUHAMMAD JALI NOOR, S.T	197205262012121003	KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA SMP	PANGKALAN BUN, 26 Mei 1972
268	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	WHINDA SHARY, S.Sos	198312032010012011	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	KUMAL, 3 Desember 1983
269	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ERNAWATI, SE	197111301999032008	PELABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	SEI TEWU, 30 November 1971
270	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	HENDRA ROOSIDI, S.Kom	198407272011011002	PELABAT PELAKSANA TENNIS KEGIATAN	PANGKALANBUN, 27 Juli 1984
271	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	INDRASTUTI, S.AP,M.SI	197308191997022002	PELABAT PELAKSANA TENNIS KEGIATAN	BOYOLALI, 19 Agustus 1973
272	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RAHMAN, SH	197703122012121002	PELABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	KOTAWARINGIN BARAT, 12 Maret 1977
273	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	AGUNG KRISTYANTO, ST	197812012006041007	PELABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	KEBUMEN, 1 Desember 1978
274	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DEVI TALULINA WATI, S. Pd	198503152015052001	BENDAHARA	MALANG, 15 Maret 1985
275	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	AGUSTINAHITA, A.Md	197508132009032003	VERIFIKATOR KEUANGAN	PANGKALANBUN, 13 Agustus 1975
276	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MUJIATI, A.Md	198306082010012016	VERIFIKATOR KEUANGAN	GROBOGAN, 8 Juni 1983

No.	UNIT ORGANISASI	NAMA	NIP	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1	2	3	4	5	6
277	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	NOR JANAH, A.Md	198302142010012019	VERIFIKATOR KEUANGAN	PALANGKARAYA, 14 Februari 1983
278	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	NOVI SARIATI, A.Md	198211202010012010	VERIFIKATOR KEUANGAN	PURBALINGGA, 20 November 1982
279	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RETNA DEWI KURNIAWATI, A.Md	198110212010012011	VERIFIKATOR KEUANGAN	KLATEN, 21 Oktober 1981
280	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SAIJUDIN, A.Md	197705032010011017	VERIFIKATOR KEUANGAN	KUMAL, 3 Mei 1977
281	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	VERA DWITA, S.I.P.	197701012005012018	VERIFIKATOR KEUANGAN	PANGKALAN BUN, 1 Januari 1977
282	DINAS PERHUBUNGAN	AMIR HADI, S.E., M.Ec.Dev	197107281998031007	KEPALA DINAS	KOTAWARINGIN BARAT, 28 Juli 1971
283	DINAS PERHUBUNGAN	HENDRY PURNAMA, S.T. M.Si	197909172006041010	KEPALA BIDANG	KOTAWARINGIN BARAT, 17 September 1979
284	DINAS PERHUBUNGAN	NUR SOLEH, S.Si. T	196908021991031012	KEPALA BIDANG	DEMAK, 2 Agustus 1969
285	DINAS PERHUBUNGAN	HANANTA BAYU SENA, SE	197312142005011006	KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN INTEGRASI MODA	BAJANMASIN, 14 Desember 1973
286	DINAS PERHUBUNGAN	AI PURNOMO, A.Md. Tra	200101172022031001	BENDAHARA	BEKASI, 17 Januari 2001
287	DINAS PERHUBUNGAN	MUKHAMMAD TOIB, SE	198206102007011003	BENDAHARA	IDMBANG, 10 Juni 1982
288	DINAS PERHUBUNGAN	SAEPUL ANWAR, S.T.	198107172009031002	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	TANGGERANG, 17 Juli 1981
289	DINAS PERIKAMAN DAN KETAHANAN PANGAN	Ir. HEPY, M.Si	196411211993031004	KEPALA DINAS	KAPUAS, 21 November 1964
290	DINAS PERIKAMAN DAN KETAHANAN PANGAN	Ir. SUMITATI	196811121993032010	SEKRETARIS	JAKARTA, 12 November 1968
291	DINAS PERIKAMAN DAN KETAHANAN PANGAN	HERMANTO, S.PI	197207061999031008	KEPALA BIDANG	PANGKALAN BUN, 6 Juli 1972

No.	UNIT ORGANISASI	NAMA	NIP	JABATAN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1	2	3	4	5	6
396	RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN	YOGIE KURNIAWAN, SE, M.Ec.Dev	198611112009031002	KEPALA SUB BAGIAN ANGGARAN, VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN	YOGYAKARTA, 11 November 1986
397	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	MAIERUM PURNI, SH	196405211985031005	KEPALA SATUAN	KOTAWARINGIN BARAT, 21 Mei 1964
398	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	RIZA PAHLEVY, S. Hut	197308032000031002	SEKRETARIS	BANJARMASIN, 3 Agustus 1973
399	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SUPIANSYAH, SH	196811022003121003	KEPALA BIDANG	PANGKALAN BUN, 2 November 1968
400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	GUSTI MUHAMMAD ROIES, S.Sos	198406162010011021	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	BANJARMASIN, 16 Juni 1984
401	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	DESSY YESTIANNINGRUM, A.Md	198012262010012010	BENDAHARA	CILACAP, 26 Desember 1980
402	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	DODDY GUNAWAN	198201112007011004	VERIFIKATOR KEUANGAN	BANJARMASIN, 11 Januari 1982



 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



 EDDI SANTOSA